

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital, cara masyarakat melakukan aksi sosial dan politik mengalami perubahan signifikan. Media sosial, yang awalnya hanya dipandang sebagai ruang hiburan, kini berkembang menjadi arena penting dalam menggerakkan aksi sosial, menyuarakan pendapat politik, dan membentuk opini publik. Fenomena ini dikenal dengan istilah aktivisme digital, sebuah bentuk gerakan sosial yang ditandai dengan akses yang luas, biaya yang relatif rendah, dan kemampuan menjangkau audiens dalam waktu singkat (Putri, 2023). Aktivisme digital membuka peluang partisipasi yang lebih besar, tidak hanya bagi aktivis, tetapi juga masyarakat umum untuk terlibat dalam berbagai isu publik.

Konsep ini erat kaitannya dengan teori *connective action* (Bennett & Segerberg, 2012), di mana keterlibatan individu dalam gerakan sosial semakin dimudahkan oleh teknologi digital. Gerakan sosial tidak lagi bergantung pada organisasi formal atau ideologi tunggal, tetapi justru terhubung melalui jaringan longgar dengan motivasi yang beragam. Dalam konteks ini, media sosial menghadirkan ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya demokratisasi partisipasi, meskipun tetap menghadapi tantangan berupa lemahnya kohesi antaraktor (Putri, 2023). Fenomena ini juga diperkuat dengan teori *Computer Mediated Communication (CMC)* yang menjelaskan bagaimana teknologi digital menciptakan pola komunikasi berbeda dari interaksi tatap muka. Komunikasi daring menghadirkan kecepatan, keterbukaan, dan keterhubungan lintas batas, sehingga isu-isu lokal dapat dengan cepat menjadi perhatian global.

Dengan demikian, aktivisme digital dapat dipandang sebagai fenomena penting dalam studi komunikasi kontemporer. Ia bukan sekadar bentuk adaptasi gerakan sosial ke ruang maya, melainkan juga transformasi dalam cara masyarakat membangun kesadaran, solidaritas, dan aksi bersama terhadap isu-isu yang mereka anggap penting.

Perkembangan aktivisme digital di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam satu dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial.

Laporan We Are Social (2024) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta orang dengan tingkat penetrasi sekitar 66,5% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar mengakses media sosial setiap hari, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan basis pengguna media sosial terbesar di dunia.

Media sosial kemudian menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu-isu publik, termasuk politik dan lingkungan. Lestari (2025) dalam penelitiannya mengenai kampanye *#AllEyesOnPapua* menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam memobilisasi aksi kolektif terkait isu lingkungan dan politik di Papua. Hashtag tersebut berhasil menjadi simbol perlawanan publik terhadap eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat adat Papua, sekaligus menegaskan potensi media sosial sebagai instrumen advokasi lingkungan dan politik.

Contoh lain dapat dilihat pada gerakan ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). Seperti dijelaskan oleh Putri (2023), ForBALI memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memperluas jangkauan kampanye menolak reklamasi Teluk Benoa. Melalui aktivisme digital, ForBALI mampu mengorganisir massa, menyebarkan informasi, dan membangun jejaring solidaritas hingga akhirnya berhasil menekan pemerintah untuk membatalkan proyek reklamasi tersebut.

Fenomena serupa muncul pada Pandawara Group, sekelompok anak muda yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan isu kebersihan lingkungan. Purnama (2024) mencatat bahwa meskipun Pandawara Group mendapat respons positif dari publik digital, terdapat kesenjangan antara interaksi simbolik di media sosial (seperti *like*, *share*, dan komentar) dengan keterlibatan nyata dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial mampu memobilisasi atensi publik, tidak semua interaksi digital berujung pada aksi kolektif nyata.

Selain kelompok masyarakat sipil, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah juga telah menunjukkan bagaimana aktivisme digital dapat menjadi bagian dari strategi advokasi lingkungan. Sofia (2025) menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim, khususnya pada momentum Milad ke-111

Muhammadiyah. Kampanye digital ini menjadi bentuk dakwah lingkungan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus memperlihatkan bagaimana institusi besar memanfaatkan media sosial untuk memperluas pengaruh gerakan ekologis.

Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa aktivisme digital di Indonesia berkembang secara pesat dan semakin beragam. Media sosial digunakan bukan hanya oleh aktivis independen, tetapi juga komunitas lokal, kelompok anak muda, hingga organisasi keagamaan. Ekosistem digital di Indonesia pun sangat dinamis dan menyediakan ruang bagi munculnya berbagai bentuk aktivisme, meskipun tetap menghadapi tantangan berupa konsistensi, keberlanjutan, dan efektivitas dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam konteks ini, TikTok menjadi salah satu platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat, termasuk di Indonesia. Formatnya yang berbasis video pendek, didukung algoritma cerdas, menjadikan TikTok mampu mendorong viralitas konten dalam waktu singkat. Hal ini membuat TikTok tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga medium yang efektif untuk penyebaran informasi dan mobilisasi isu-isu sosial. Laporan We Are Social (2024) mencatat bahwa TikTok berada di urutan ketiga sebagai aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan lebih dari 10 juta pengguna aktif bulanan. Fakta ini menunjukkan bahwa TikTok memiliki basis pengguna yang sangat luas, terutama dari kalangan generasi muda yang cenderung aktif dalam isu sosial maupun politik.

Penelitian Aisyah (2023) menekankan bahwa interaktivitas media sosial merupakan salah satu kunci yang menjadikan TikTok efektif sebagai ruang advokasi. Fitur komentar, *like*, dan *share* bukan hanya menjadi sarana ekspresi individu, tetapi juga membentuk diskursus publik. Interaktivitas ini memungkinkan setiap pengguna tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga produsen makna melalui partisipasi mereka. Temuan ini diperkuat oleh studi EPJ (2023) *Talking Environment on TikTok: Messages, Social Actors, and Engagement*, yang mengungkapkan bahwa karakteristik pesan, peran aktor sosial, dan tingkat keterlibatan audiens menentukan efektivitas kampanye lingkungan di TikTok. Pesan lingkungan yang dikemas secara kreatif, sederhana, dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda lebih mudah viral serta mendorong keterlibatan publik yang lebih luas.

Selain itu, laporan UNEP (2023) tentang strategi komunikasi lingkungan di TikTok menegaskan bahwa platform ini efektif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ekologi global, asalkan kontennya memadukan aspek edukasi dan hiburan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *edutainment*, yakni mengemas isu serius dalam bentuk yang menghibur agar lebih mudah diterima audiens. Dengan karakteristik tersebut, TikTok telah menjelma menjadi ruang publik baru yang relevan untuk aktivisme digital, terutama di kalangan generasi muda Indonesia.

Fenomena aktivisme digital tidak dapat dilepaskan dari strategi kampanye yang memanfaatkan media sosial sebagai medium utama. Studi Ismahani dkk. (2023) mengenai gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan digital ditentukan oleh tiga elemen: aksesibilitas, visibilitas/popularitas, dan ekosistem yang mendukung partisipasi publik. Hal ini relevan dengan kasus *@sadampermanawiyana*, di mana akses mudah melalui TikTok memungkinkan publik mengetahui isu tambang nikel, visibilitas dibangun melalui viralitas konten singkat, dan ekosistem diskusi hadir di kolom komentar yang menjadi arena respon netizen.

Selain itu, kampanye digital kerap bersifat lintas-platform. Studi Wahyuddin dkk. (2024) tentang gerakan *#FreePalestine* menegaskan pentingnya sinergi antar platform seperti Twitter, TikTok, dan YouTube dalam memperluas jangkauan isu. Dalam konteks Raja Ampat, meskipun narasi ada di TikTok, respon netizen dapat membentuk ekosistem advokasi yang lebih luas, terutama jika narasi tersebut dibawa ke platform lain oleh netizen.

Puspitasari (2024) juga menekankan bahwa aktivisme digital dapat bertransformasi menjadi aksi nyata ketika kekecewaan publik mencapai titik kulminasi, seperti terlihat dalam kasus *Garuda Biru* yang bermula dari unggahan simbolis di media sosial lalu berubah menjadi demonstrasi di dunia nyata. Hal ini memberi gambaran bahwa respon netizen tidak hanya berhenti pada interaksi simbolik (*like, komentar, share*), tetapi berpotensi menjadi katalis bagi mobilisasi massa.

Dalam konteks Indonesia, Ayudha (2024) menyoroti keterampilan aktivisme digital, yakni strategi khas seperti penggunaan hashtag, meme, dan kampanye visual yang

mempermudah mobilisasi klaim politik. Keterampilan ini memperlihatkan bagaimana generasi muda, terutama *digital natives*, memaknai aktivisme sebagai bagian dari identitas politik mereka.

Lebih jauh, Fazrina dkk. (2025) mengungkapkan bahwa Generasi Z memandang aktivisme digital sebagai sarana efektif menyuarakan pendapat dan membangun solidaritas. Namun, mereka juga menyadari adanya risiko *slacktivism* (aktivisme semu) dan disinformasi. Hal ini sesuai dengan kasus Sadam, di mana banyak komentar netizen menunjukkan kepedulian, tetapi tidak semua berujung pada aksi nyata.

Sementara itu, Khairuddin (2025) menekankan bahwa bagi anak muda, aktivisme digital adalah bentuk partisipasi politik baru yang ditandai dengan tagar, petisi online, hingga meme. Motivasi mereka berasal dari pencarian identitas kolektif dan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, respon netizen terhadap konten Sadam tidak hanya dapat dibaca sebagai ekspresi spontan, tetapi juga refleksi atas posisi politik generasi muda dalam menghadapi isu lingkungan strategis.

Salah satu isu politik ekologis yang mengemuka di Indonesia adalah eksploitasi nikel. Berdasarkan laporan United States Geological Survey (USGS, 2022), Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 48,48% dari total produksi global. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam rantai pasokan global baterai kendaraan listrik, sebuah industri yang berkembang pesat seiring dengan transisi energi dunia menuju sumber energi ramah lingkungan. Namun, meskipun memiliki nilai ekonomi tinggi, industri nikel juga membawa dampak lingkungan serius seperti deforestasi, kerusakan habitat, pencemaran air, hingga degradasi ekosistem laut (Putri, 2023).

Dalam konteks politik ekologis, eksploitasi nikel menjadi isu kontroversial karena melibatkan tarik menarik kepentingan antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan aktivis lingkungan. Kurnia (2023) menegaskan bahwa gerakan lingkungan di Indonesia sering muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan kapitalisme global daripada kelestarian lingkungan. Isu ini juga mencerminkan paradoks transisi energi global, di satu sisi, nikel dianggap mineral penting untuk energi bersih,

namun disisi lain, penambangannya justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang kontraproduktif terhadap tujuan keberlanjutan.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Raja Ampat di Papua Barat Daya. Kawasan ini dikenal sebagai “*The Crown Jewel of Marine Biodiversity*” karena memiliki lebih dari 600 spesies karang dan 1.600 spesies ikan (WWF Indonesia, 2023). Selain nilai ekologis, Raja Ampat juga memiliki nilai ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan. Data Kementerian Pariwisata (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata di Raja Ampat terhadap pendapatan asli daerah meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata kunjungan wisatawan mencapai 20.000–25.000 orang per tahun sebelum pandemi. Namun, rencana eksploitasi nikel di kawasan ini menimbulkan kontroversi besar karena dikhawatirkan dapat menghancurkan ekosistem laut yang rentan dan berharga.

Kurnia (2023) menyebut bahwa perlawanan terhadap tambang di kawasan strategis ekologis seperti Raja Ampat mencerminkan politik ekologis baru, di mana masyarakat sipil tidak hanya menuntut hak atas lingkungan yang sehat, tetapi juga mempertahankan ruang hidup dari ancaman kapitalisme ekstraktif. Senada dengan itu, Lestari (2025) dalam kajian *#AllEyesOnPapua* menunjukkan bahwa isu lingkungan di Papua sering mendapat perhatian nasional melalui media sosial karena dipandang sebagai simbol perjuangan masyarakat adat melawan eksploitasi sumber daya alam.

Dalam dinamika aktivisme digital terkait isu ekologis ini, muncul sosok Sadam Permana Wiyana, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang aktif mengangkat banyak isu sosial publik di TikTok. Melalui akun @sadampermanawiyana, ia memproduksi konten singkat, visual, dan mudah dipahami salah satunya mengenai kontroversi tambang nikel di Raja Ampat. Strategi komunikasi yang digunakannya sesuai dengan karakteristik TikTok, di mana *edutainment* menjadi pendekatan utama agar isu serius dapat diterima khalayak luas (EPJ, 2023).

Namun, fenomena menarik terjadi ketika sebagian konten Sadam mengenai tambang nikel di Raja Ampat hilang dari TikTok. Hanya tersisa arsip berupa satu video dan sekitar 200 komentar. Hilangnya konten ini menyoroti kerentanan aktivisme digital yang tetap dikontrol

oleh logika platform dan kepentingan politik ekonomi tertentu. Seperti ditunjukkan dalam studi Lestari (2025), fenomena pembatasan distribusi konten pada isu sensitif seperti Papua menegaskan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya bebas.

Kejadian ini menegaskan urgensi penelitian terkait aktivisme digital. Pertama, fenomena hilangnya konten memperlihatkan bagaimana ruang interaktivitas digital dapat tiba-tiba lenyap, hanya meninggalkan arsip terbatas. Kedua, hal ini menunjukkan bahwa aktivisme digital bukan hanya persoalan menyuarakan isu, tetapi juga berhadapan dengan tantangan moderasi, sensor, dan regulasi platform.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat adanya beberapa gap penelitian. Pertama, fokus kajian terdahulu lebih banyak pada strategi aktivis seperti ForBALI, Pandawara Group, atau Muhammadiyah, sementara penelitian yang mengkaji respon netizen secara spesifik masih terbatas, padahal keterlibatan audiens sangat penting dalam efektivitas aktivisme digital. Kedua, studi tentang TikTok dalam konteks aktivisme lingkungan relatif baru dibandingkan platform lain seperti Twitter atau Instagram (EPJ, 2023). Ketiga, fenomena hilangnya konten seperti yang dialami Sadam Permana belum banyak diteliti, padahal hal ini membuka pertanyaan kritis tentang keberlanjutan ruang digital sebagai arena demokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena menggabungkan beberapa aspek penting: (1) penggunaan TikTok sebagai medium advokasi lingkungan, (2) isu politik ekologis yang kontroversial dengan implikasi luas, (3) respon netizen sebagai representasi opini publik digital, dan (4) dinamika hilangnya konten sebagai fenomena baru dalam studi aktivisme digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian komunikasi digital, khususnya dalam memahami peran interaktivitas media sosial dalam aktivisme lingkungan serta tantangan keberlanjutan ruang digital sebagai arena demokrasi publik.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian pada tema ini, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana respon netizen terhadap aktivisme digital isu politik ekologis pada akun TikTok @Sadampermana yang membahas isu tambang nikel di Raja Ampat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis respon netizen terhadap aktivisme digital isu politik ekologis pada akun TikTok @Sadampermanawiyana yang membahas isu tambang nikel di Raja Ampat.

